



**PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL BERBASIS MANAJEMEN
BERKELANJUTAN DI KABUPATEN PANGANDARAN**

Irpan Ilmi

STITNU Al Farabi Pangandaran

Correspondence Email: irpanilmi1@gmail.com

Received: 17/12/2025

Accepted: 21/12/2025

Published: 30/12/2025

Abstract

Halal tourism has developed into a new paradigm in destination management that balances spiritual, economic, and environmental values. Pangandaran Regency, with its strong natural and cultural tourism potential, faces challenges in implementing national halal standards and integrated sustainability principles. This study aims to analyse the basic concepts, implementation gaps, and strategies for developing halal tourism based on sustainable management in Pangandaran. This study uses a qualitative approach with a literature review method of various academic and regulatory sources, as well as empirical research related to halal destination management in Indonesia. The analysis was conducted through conceptual synthesis that integrates the values of Maqāṣid Sharī'ah with the three pillars of environmental, social, and economic sustainability in the context of tourism product and service development. The results of the study show that the development of halal tourism in Pangandaran still faces a gap between national standards and actual conditions, especially in halal certification, the provision of worship facilities, and environmental management. However, great potential emerges through the application of green hotel certification strategies, halal supply chain management, and community-based halal tourism that strengthen the synergy between sustainability and sharia values. Regional policy support, multi-stakeholder collaboration, and digital transformation are also important factors in realising Halal and Sustainable Coastal Tourism destinations. This study confirms that the integration of sharia principles and sustainable management can be an effective framework for the development of halal tourism in Pangandaran. This model not only increases the competitiveness of the destination but also contributes to the welfare of the local community and the preservation of the coastal ecosystem.

Keywords: *halal tourism, sustainable management, Maqāṣid Sharī'ah, Pangandaran, halal certification, tourism governance.*

Abstrak

Pariwisata halal telah berkembang menjadi paradigma baru dalam pengelolaan destinasi yang menyeimbangkan nilai spiritual, ekonomi, dan lingkungan. Kabupaten Pangandaran, dengan potensi wisata alam dan budaya yang kuat, menghadapi tantangan dalam menerapkan standar halal nasional serta prinsip keberlanjutan yang terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dasar, kesenjangan implementasi, serta strategi pengembangan pariwisata halal berbasis manajemen berkelanjutan di Pangandaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur (literature review) terhadap berbagai sumber akademik dan regulatif, serta penelitian empiris terkait pengelolaan destinasi halal di Indonesia. Analisis dilakukan melalui sintesis konseptual yang mengintegrasikan nilai-nilai Maqāṣid Sharī'ah dengan tiga pilar keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam konteks pengembangan produk dan layanan wisata. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata halal di Pangandaran masih menghadapi kesenjangan antara standar nasional dan kondisi aktual, terutama dalam sertifikasi halal, penyediaan fasilitas ibadah, dan pengelolaan lingkungan. Namun, potensi besar muncul melalui penerapan strategi green hotel certification, halal supply chain management, dan community-based halal tourism yang memperkuat sinergi antara keberlanjutan dan nilai syariah. Dukungan kebijakan daerah, kolaborasi multi-stakeholder, dan transformasi digital juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan destinasi Halal and Sustainable Coastal Tourism. Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi prinsip syariah dan manajemen berkelanjutan dapat menjadi kerangka efektif bagi pembangunan pariwisata halal di Pangandaran. Model ini tidak hanya meningkatkan daya saing destinasi, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat lokal dan kelestarian ekosistem pesisir

Kata Kunci: *pariwisata halal, manajemen berkelanjutan, Maqāṣid Sharī'ah, Pangandaran, sertifikasi halal, tata kelola pariwisata*

A. Introduction

Kabupaten Pangandaran telah dikenal luas sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Nasional (KSPN) di Jawa Barat, dengan keunggulan utama pada wisata bahari, alam, dan konservasi, seperti Pantai Pangandaran, Green Canyon, dan Cagar Alam (Nadiya & Saraswati, 2017; Hakim, 2024). Potensi ini didukung oleh visi daerah untuk mewujudkan Pangandaran sebagai tujuan wisata berkelas dunia yang berbasis lingkungan, alam, dan budaya (DISPARBUD Pangandaran, 2020 dalam Hakim, 2024).

Pangandaran, tercatat memiliki 232 jenis daya tarik wisata. Hal ini, menghadapi beberapa isu krusial yang perlu diatasi, terutama dalam konteks persaingan global dan tuntutan pasar yang semakin spesifik, seperti Isu Keberlanjutan Lingkungan dan Sosial, Kebutuhan Diversifikasi Produk dan Pasar, Tuntutan Pasar Wisata Halal Global.

Perkembangan pesat seringkali menimbulkan tantangan dalam aspek keberlanjutan. Kajian menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata Pangandaran masih perlu dioptimalkan dalam beberapa indikator keberlanjutan, seperti pengelolaan sampah kepariwisataan, daya dukung lingkungan, dan partisipasi masyarakat lokal yang belum maksimal (Komalasari & Herwangi, 2023; Sultan et al., 2024). Diperlukan integrasi model manajemen yang dapat memastikan manfaat ekonomi sejalan dengan pelestarian alam dan budaya (Hakim, 2019).

Ketergantungan Pangandaran pada atraksi alam dan bahari utama (pantai) menyebabkan objek wisata lain seperti Pantai Madasari cenderung sepi (repository Telkom University, 2025). Selain itu, kurangnya komponen lain seperti pertunjukan wisata, monumen, atau inovasi dalam promosi menjadi hambatan pengembangan potensi secara holistik (Ratnasari, 2023). Hal ini menunjukkan perlunya diversifikasi produk dan target pasar.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan Pariwisata Halal (El-Gohary, 2016; Astuti, 2021). Pasar Muslim global menuntut produk dan layanan yang menjamin kepastian makanan halal, fasilitas ibadah yang memadai, dan aktivitas yang sesuai dengan prinsip syariat (Mohsin et al. dalam Ramadhan, 2022). Walaupun Pangandaran telah memiliki modal dasar seperti banyaknya masjid yang mudah diakses (repository UIN SGD, 2023), fokus implisit pada aspek halal dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah masih perlu diperkuat dengan regulasi khusus dan standarisasi layanan (Ahyani, Putra, & Mutmainah, 2022).

Pengembangan Pariwisata Halal menawarkan solusi untuk diversifikasi pasar sekaligus meningkatkan kualitas layanan berdasarkan etika Islam yang juga menekankan pada kebersihan (*thayyib*) dan keberlanjutan (Astuti, 2021; Hakim, 2024).

Meskipun visi dan potensi telah ditetapkan, integrasi antara Pariwisata Halal dan Manajemen Berkelanjutan di Pangandaran masih bersifat konseptual dan belum dievaluasi secara mendalam pada level operasional. Isu krusial yang muncul adalah: bagaimana produk dan layanan pariwisata eksisting di Kabupaten Pangandaran memenuhi standar *Halal* sekaligus menerapkan prinsip *Manajemen Berkelanjutan*?

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada kajian literatur untuk mengidentifikasi gap antara praktik pariwisata saat ini di Pangandaran, khususnya pada aspek produk (atraksi, paket wisata) dan layanan (akomodasi, kuliner, fasilitas), dengan standar yang dituntut oleh kerangka Pariwisata Halal dan prinsip Keberlanjutan.

B. Method

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur sistematis (*Systematic Literature Review - SLR*). Sumber data primer dan sekunder berupa jurnal ilmiah, prosiding, laporan, dan buku yang relevan dengan topik pariwisata halal, manajemen berkelanjutan, dan destinasi Pangandaran dikumpulkan. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi, mengkategorikan, dan mensintesis temuan-temuan terkait aspek produk dan layanan (seperti makanan/minuman, akomodasi, atraksi, dan amenities) untuk melihat kesesuaiannya dengan standar halal dan prinsip keberlanjutan.

C. Results and Discussion

Results

Hasil penelitian ini berfokus pada pembangunan kerangka konseptual dan analisis kesenjangan guna merumuskan model strategis pengembangan pariwisata halal yang berkelanjutan di Kabupaten Pangandaran.

Secara konseptual, penelitian berhasil mengintegrasikan nilai-nilai spiritual Islam yang diwakili oleh Maqāṣid Shari'ah dengan paradigma global Tiga Pilar Manajemen Berkelanjutan (lingkungan, sosial, dan ekonomi). Integrasi ini membentuk fondasi teoritis yang disebut Maqāṣid Shari'ah-based Sustainable Tourism Management. Ditemukan bahwa prinsip-prinsip syariat seperti perlindungan lingkungan)secara langsung selaras dengan pilar lingkungan, sementara perlindungan harta dan hifz pelestarian keturunan selaras dengan tuntutan keadilan sosial dan ekonomi berkelanjutan. Konsep dasar Pariwisata Halal sendiri didefinisikan secara luas, melampaui sekadar bebas dari hal yang diharamkan, melainkan harus mewujudkan dimensi *thayyib* (baik, bersih, higienis), yang merupakan jembatan spiritual dan fungsional menuju praktik-praktik keberlanjutan.

Meskipun Pangandaran memiliki potensi produk wisata yang kuat—meliputi wisata bahari, budaya (Seni Badud), dan edukasi (Eduwisata Mangrove)—analisis kesenjangan implementasi menunjukkan adanya tantangan signifikan. Mayoritas pelaku usaha di Pangandaran belum mengadopsi sertifikasi halal resmi untuk produk dan layanan, terutama di sektor akomodasi dan kuliner. Mereka masih mengandalkan klaim "halal secara tradisional," yang menimbulkan kesenjangan dengan standar nasional yang ditetapkan oleh KNEKS dan DSN-MUI. Selain itu, fasilitas ibadah di area wisata belum sepenuhnya memenuhi standar kenyamanan dan kebersihan, dan upaya pengelolaan lingkungan, seperti efisiensi energi dan pengelolaan limbah pada akomodasi, masih bersifat parsial dan belum terstandar secara kelembagaan.

Untuk menjembatani kesenjangan ini, dirumuskan tiga instrumen strategi utama untuk implementasi manajemen berkelanjutan berbasis halal di Pangandaran, yang berfokus pada

dimensi lingkungan, ekonomi, dan sosial secara terintegrasi, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Strategi Implementasi	Fokus Pilar Keberlanjutan	Deskripsi Kunci
Green Hotel Certification	Lingkungan dan Sosial	Menerapkan standar <i>Muslim-friendly hospitality</i> (penanda kiblat, alat salat, makanan halal) yang diintegrasikan dengan praktik ramah lingkungan (efisiensi energi, pengelolaan limbah).
Halal Supply Chain Management	Ekonomi dan Sosial	Memastikan kehalalan dan ketertelusuran produk kuliner lokal (ikan asin, sale pisang) melalui sertifikasi dan penggunaan bahan pangan lokal (<i>farm-to-table</i>) untuk memperkuat ekonomi UMKM.
Community-Based Halal Tourism	Sosial dan Ekonomi	Pemberdayaan masyarakat lokal sebagai aktor utama (pengelola <i>homestay</i> syariah, pemandu wisata) untuk memastikan distribusi manfaat ekonomi yang adil dan pelestarian nilai budaya.

Ketiga strategi ini berfungsi sebagai manifestasi konkret dari penerapan nilai Maqāṣid Shari'ah dalam tata kelola pariwisata, memastikan bahwa Pangandaran dapat diposisikan sebagai destinasi *Halal and Sustainable Coastal Tourism* yang kompetitif, etis, dan ekologis.

Discussion

Konsep Dasar Pariwisata Halal dan Manajemen Berkelanjutan

Pariwisata Halal didefinisikan secara luas bukan hanya sebagai wisata yang bebas dari hal yang diharamkan (alkohol dan babi), melainkan sebagai penyediaan seluruh layanan dan pengalaman yang sesuai dengan nilai-nilai dan etika Islam, menjamin kenyamanan spiritual dan fisik wisatawan Muslim (Battour & Ismail, 2016). Secara filosofis, Halal Tourism mewujudkan dimensi *thayyib* (baik, bersih, higienis), yang sangat relevan dengan tuntutan kualitas layanan dan produk di destinasi seperti Pangandaran (Astuti, 2021).

Ma'ruf Amin, selaku Wakil Presiden Republik Indonesia sekaligus tokoh ekonomi syariah, menegaskan bahwa pengembangan pariwisata halal harus berlandaskan pada konsep ekonomi syariah yang bersifat universal. Menurutnya, pariwisata halal tidak dimaksudkan untuk melakukan Islamisasi destinasi wisata secara total, melainkan menambahkan layanan tambahan (add-on) yang memudahkan wisatawan Muslim dalam menjalankan kewajiban agamanya (Republika, 2021). Konsep tersebut sejalan dengan prinsip kemaslahatan dan inklusivitas dalam ekonomi syariah.

Pentingnya sertifikasi dan standarisasi dalam produk serta layanan pariwisata halal menjadi aspek krusial dalam pengembangannya. Keberhasilan pariwisata halal bergantung

pada pemenuhan tiga pilar utama, yaitu Halal Food (makanan dan minuman), Halal Services (layanan akomodasi dan fasilitas ibadah), serta Halal Activities (aktivitas wisata yang etis) (Noor, 2019). Tanpa adanya standarisasi yang jelas, kepercayaan wisatawan Muslim terhadap destinasi halal akan sulit terwujud.

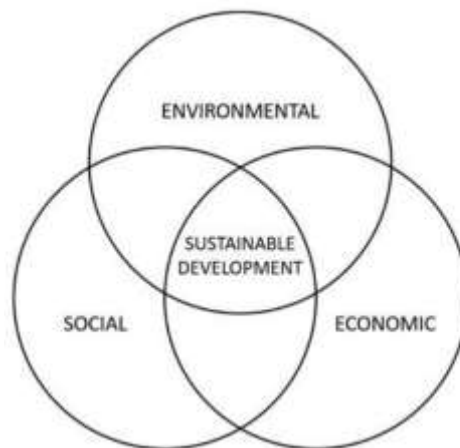
Manajemen Berkelanjutan dalam pariwisata adalah proses pengelolaan sumber daya sedemikian rupa sehingga kebutuhan ekonomi, sosial, dan estetika dapat terpenuhi sambil mempertahankan keutuhan budaya, proses ekologis esensial, keragaman biologis, dan sistem pendukung kehidupan (WCED, 1987).

Prinsip tata kelola pariwisata yang terintegrasi dan partisipatif menjadi landasan penting dalam mewujudkan keberlanjutan pembangunan sektor ini. Keberlanjutan tersebut harus didasarkan pada integrasi aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pengambilan keputusan jangka panjang agar pembangunan masa kini tidak mengorbankan kepentingan generasi mendatang (Mitchell, 1991, dalam Hunter, 1997). Dalam konteks Pangandaran, penerapan prinsip ini menuntut agar pembangunan akomodasi dan infrastruktur disesuaikan dengan daya dukung ekologi pesisir.

Konsep pembangunan berwawasan lingkungan menjadi prinsip utama dalam memastikan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam. Pembangunan, termasuk di sektor pariwisata, harus menjaga keseimbangan antara penggunaan sumber daya saat ini dan ketersediaannya bagi generasi mendatang (Salim, 2010). Dalam konteks Pangandaran, penerapan prinsip tersebut menekankan pentingnya upaya pencegahan kerusakan lingkungan melalui pengendalian abrasi dan pengelolaan sampah yang efektif (Komalasari & Herwangi, 2023).

Model tiga pilar pembangunan berkelanjutan yang dikembangkan oleh George P. Mitchell menekankan bahwa keberlanjutan hanya dapat tercapai melalui integrasi antara dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dalam model berbentuk *Venn Diagram* ini, *sustainable development* ditempatkan di titik irisan ketiga dimensi tersebut, yang menunjukkan keterkaitan dan ketergantungan antara satu dimensi dengan lainnya dalam mencapai keseimbangan pembangunan jangka panjang.

Dimensi lingkungan berfungsi sebagai dasar yang menjamin ketersediaan sumber daya alam dan menjaga stabilitas ekosistem. Mitchell (1991) menekankan bahwa pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan harus memastikan bahwa kegiatan



ekonomi dan sosial tidak melampaui daya dukung lingkungan. Hal ini sejalan dengan pandangan Emil Salim yang menyatakan bahwa pembangunan berwawasan lingkungan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, aspek lingkungan menjadi landasan moral dan struktural bagi keberlanjutan pembangunan.

Dimensi sosial dalam pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya pemerataan manfaat, peningkatan kesejahteraan, dan pelibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Chambers dan Conway (1992) menyebutkan bahwa keberlanjutan sosial terkait erat dengan kemampuan masyarakat untuk mempertahankan mata pencaharian yang layak dan adaptif terhadap perubahan. Dalam konteks pariwisata, hal ini berarti masyarakat lokal harus dilibatkan sebagai aktor utama yang berperan dalam menjaga nilai budaya, melestarikan lingkungan, dan memperoleh manfaat ekonomi secara adil.

Sementara itu, dimensi ekonomi berfokus pada efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan kegiatan ekonomi yang tidak merusak lingkungan maupun menimbulkan kesenjangan sosial. Pearce dan Turner (1990) menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai efisiensi penggunaan sumber daya hanya akan menghasilkan ketimpangan dan degradasi lingkungan. Oleh karena itu, pendekatan ekonomi berkelanjutan menuntut adanya inovasi dalam sistem produksi dan konsumsi agar tetap selaras dengan prinsip pelestarian alam dan kesejahteraan sosial.

Integrasi antara ketiga dimensi tersebut menciptakan sinergi yang menjadi inti dari konsep *sustainable management*. Hunter (1997) menjelaskan bahwa titik keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan bukanlah kondisi statis, melainkan hasil dari proses adaptif yang terus berkembang seiring perubahan kebutuhan masyarakat dan kapasitas ekosistem. Artinya, pembangunan yang berkelanjutan tidak dapat dicapai hanya dengan memperhatikan salah satu dimensi, melainkan harus menempatkan ketiganya dalam hubungan timbal balik yang dinamis.

Dalam konteks pengembangan pariwisata halal di Kabupaten Pangandaran, model tiga pilar ini memiliki relevansi strategis. Pengelolaan destinasi harus berorientasi pada keberlanjutan lingkungan pesisir, pemberdayaan masyarakat lokal sebagai pelaku utama industri pariwisata, serta penguatan nilai ekonomi melalui produk dan layanan halal yang kompetitif. Dengan demikian, pendekatan *Sustainable Halal Tourism Management* tidak hanya berfungsi sebagai strategi ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan yang inklusif, etis, dan ekologis.

Integrasi antara konsep Pariwisata Halal dan Manajemen Berkelanjutan mencerminkan upaya harmonisasi antara nilai-nilai spiritual Islam dan prinsip-prinsip keberlanjutan global. Dalam perspektif Islam, aktivitas ekonomi, termasuk pariwisata, tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga harus berlandaskan pada nilai etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Prinsip ini sejalan dengan gagasan pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagaimana diuraikan dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Konsep *Maqāṣid Sharī'ah* (tujuan syariat) menjadi kerangka normatif yang relevan dalam mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan ke dalam pengembangan pariwisata halal. *Maqāṣid Sharī'ah* bertujuan untuk melindungi lima aspek utama kehidupan manusia, yaitu agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) (Al-Raysūni, 1992). Dalam konteks pariwisata, prinsip-prinsip tersebut menuntut adanya praktik yang etis, adil, serta memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal sebagai bagian integral dari ibadah sosial (*mu'āmalah*).

Dimensi lingkungan (*ḥifẓ al-bī'ah*) menjadi salah satu manifestasi penting dari *Maqāṣid Sharī'ah* yang menekankan perlindungan terhadap ciptaan Allah. Menurut Khalid (2002), konsep *khalīfah fī al-arḍ* menegaskan tanggung jawab manusia sebagai pengelola bumi yang wajib menjaga keseimbangan ekosistem. Dengan demikian, prinsip keberlanjutan lingkungan dalam pariwisata halal bukan sekadar pilihan strategis, melainkan kewajiban moral dan teologis untuk mencegah kerusakan (*fasād*) yang dapat merusak keberlangsungan hidup.

Selain aspek lingkungan, dimensi kesejahteraan sosial-ekonomi (*ḥifẓ al-māl*) juga menjadi fokus penting dalam integrasi kedua konsep tersebut. Hakim (2024) menekankan bahwa pengembangan pariwisata halal harus menjamin keadilan ekonomi bagi masyarakat lokal melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas usaha mikro, serta distribusi manfaat yang merata. Pandangan ini diperkuat oleh Duman (2011), yang menilai bahwa keberhasilan pariwisata halal tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kesejahteraan sosial dan pemerataan manfaat bagi komunitas sekitar.

Selanjutnya, prinsip *ḥifẓ al-'aql* dan *ḥifẓ al-nasl* turut memberikan landasan etis bagi praktik pariwisata halal yang edukatif dan ramah keluarga. Battour dan Ismail (2016) menyebutkan bahwa destinasi pariwisata halal harus mampu menciptakan lingkungan yang

mendukung perilaku etis, pendidikan moral, serta keamanan bagi semua kalangan. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai syariah dan keberlanjutan dapat menghasilkan sistem pariwisata yang berorientasi pada kemaslahatan (*maṣlaḥah ‘āmmah*), yaitu kesejahteraan universal yang mencakup aspek spiritual, sosial, dan ekologis.

Dalam konteks Kabupaten Pangandaran, penerapan integrasi ini dapat diwujudkan melalui pengelolaan destinasi wisata yang memperhatikan daya dukung lingkungan pesisir, pemberdayaan masyarakat lokal berbasis nilai-nilai Islam, serta penyediaan produk dan layanan halal yang berkelanjutan. Model ini tidak hanya memperkuat identitas kepariwisataan berbasis syariah, tetapi juga mendukung agenda pembangunan berkelanjutan secara komprehensif. Dengan demikian, pendekatan *Maqāṣid Shari‘ah-based Sustainable Tourism Management* menjadi fondasi strategis dalam membangun ekosistem pariwisata yang etis, inklusif, dan lestari.

Lombok telah menjadi model nasional dengan keberhasilannya memperoleh pengakuan sebagai *World’s Best Halal Tourism Destination* oleh *World Halal Travel Awards* (2015), ditandai dengan sistem sertifikasi halal yang kuat, pengelolaan akomodasi syariah terstandar, serta dukungan regulatif yang komprehensif melalui *Masterplan Halal Tourism NTB* (Rahman & Aziz, 2019). Banyuwangi menonjol dalam integrasi antara *eco-tourism* dan *cultural tourism* melalui program *Smart Kampung* dan *Green Tourism Governance*, yang menekankan kolaborasi masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan pesisir (Utami & Hadi, 2022). Sementara itu, Pangandaran masih berada pada tahap penguatan kapasitas kelembagaan dan standardisasi layanan halal, meskipun telah memiliki potensi wisata alam dan budaya yang tinggi serta komitmen daerah terhadap keberlanjutan pesisir (Komalasari & Herwangi, 2023). Perbandingan ini memperlihatkan bahwa Lombok unggul pada aspek kelembagaan dan sertifikasi halal, Banyuwangi kuat dalam inovasi tata kelola berbasis masyarakat, sedangkan Pangandaran berpotensi menjadi destinasi unggulan baru apabila mampu mengintegrasikan nilai syariah dengan praktik keberlanjutan lingkungan dan sosial secara konsisten.

Produk wisata Kabupaten Pangandaran memperlihatkan keragaman potensi yang mencakup wisata alam, budaya, edukasi, hingga kuliner khas daerah. Pantai-pantai seperti Pangandaran Timur dan Barat, Batu Hiu, Madasari, Karapyak, dan Karangnini menjadi ikon wisata bahari yang dikenal luas. Aktivitas petualangan seperti *body rafting* di Green Canyon dan Citumang, serta olahraga air seperti *banana boat*, *jetski*, dan *snorkeling* memperkuat karakter wisata berbasis alam. Keberagaman ini menunjukkan bahwa Pangandaran memiliki basis sumber daya alam yang kuat, namun menuntut tata kelola berbasis keberlanjutan agar tidak menimbulkan degradasi lingkungan maupun ketimpangan sosial (Hunter, 1997; Komalasari & Herwangi, 2023). Dalam konteks pariwisata halal, potensi alam tersebut perlu dikelola berdasarkan prinsip *ḥifẓ al-bī‘a* (perlindungan lingkungan), yang menegaskan

kewajiban menjaga keseimbangan ekosistem sebagai bagian dari tanggung jawab spiritual manusia terhadap alam.

Keberadaan wisata budaya seperti Seni Badud, Gondang Buhun, dan Jingkrung, serta produk kerajinan tangan seperti anyaman lidi, batok kelapa, dan kerang laut mencerminkan kekayaan sosial-budaya masyarakat Pangandaran. Aktivitas kreatif ini bukan hanya berperan dalam pelestarian nilai tradisi, tetapi juga menjadi sumber ekonomi yang mendukung dimensi sosial dalam pembangunan berkelanjutan. Duman (2011) menegaskan bahwa pariwisata halal harus mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat lokal agar manfaat ekonomi terdistribusi secara adil. Dengan demikian, penguatan industri kreatif berbasis budaya di Pangandaran sejalan dengan prinsip *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) dan *ḥifẓ al-nasl* (pelestarian keturunan) dalam Maqāsid Sharī'ah, yang menekankan pentingnya kesinambungan ekonomi dan nilai sosial antar generasi.

Potensi wisata edukatif di Pangandaran, seperti Eduwisata Mangrove Sungai Cijulang, Kampung Madu, dan Museum Nyamuk, Kampung Nusantara, memperlihatkan komitmen terhadap pembelajaran ekologis dan pemberdayaan masyarakat. Aktivitas edukatif ini mendukung dimensi kognitif dalam pariwisata halal, yakni *ḥifẓ al-'aql* (pemeliharaan akal), dengan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan. Beik dan Arsyianti (2016) berpendapat bahwa pengembangan wisata edukatif berbasis syariah dapat membentuk perilaku wisatawan yang bertanggung jawab serta memperkuat etika konsumsi berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, wisata edukatif di Pangandaran tidak hanya memperkaya pengalaman wisatawan, tetapi juga menjadi sarana internalisasi nilai-nilai Islam dalam praktik keberlanjutan.

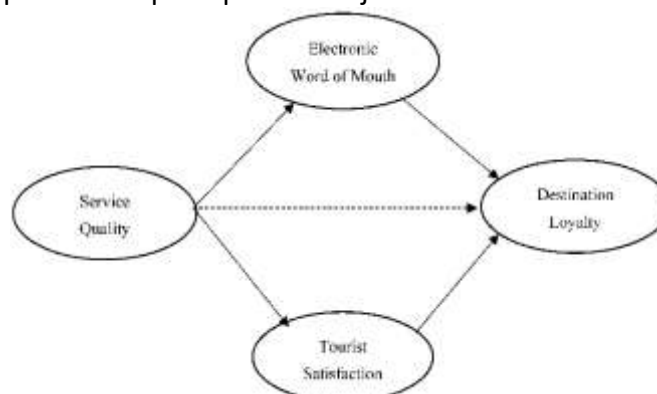
Ragam kuliner dan oleh-oleh khas seperti ikan asin, sale pisang, dan gula merah menunjukkan potensi ekonomi halal yang besar pada sektor UMKM lokal. Produk-produk ini dapat dikembangkan dengan menerapkan sertifikasi halal dan prinsip rantai pasok syariah guna meningkatkan kepercayaan konsumen. Henderson (2010) menegaskan bahwa makanan halal merupakan salah satu elemen penting dalam membangun citra destinasi wisata yang aman dan etis bagi wisatawan Muslim. Pengembangan kuliner halal di Pangandaran berkontribusi terhadap dimensi ekonomi berkelanjutan, karena mampu meningkatkan pendapatan lokal sekaligus menjaga keberlanjutan usaha berbasis sumber daya alam.

Integrasi antara pariwisata halal dan manajemen berkelanjutan menuntut penerapan tata kelola yang memperhatikan keseimbangan antara manfaat ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Mitchell (1991) dalam *The Mitchell Principles* menekankan bahwa keberlanjutan tidak dapat dicapai tanpa sinergi antara tiga pilar utama: lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dalam konteks Pangandaran, sinergi tersebut tercermin dalam upaya menjaga daya dukung ekosistem pesisir, memperkuat partisipasi masyarakat dalam ekonomi pariwisata, serta memastikan bahwa aktivitas wisata berlangsung dalam koridor nilai-nilai syariah yang inklusif dan adaptif.

Kerangka konseptual *Maqāṣid Shari'ah-based Sustainable Tourism Management* menjadi dasar integratif yang menghubungkan dimensi spiritual Islam dengan paradigma keberlanjutan global. Al-Raysūni (1992) menjelaskan bahwa tujuan syariat mencakup perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Nilai-nilai tersebut, ketika diterapkan dalam tata kelola pariwisata Pangandaran, mendorong terciptanya destinasi yang tidak hanya ramah bagi wisatawan Muslim, tetapi juga berkeadilan sosial, beretika lingkungan, dan berdaya ekonomi. Melalui pendekatan ini, Pangandaran dapat diposisikan sebagai model pengembangan pariwisata halal berkelanjutan yang menyeimbangkan kemaslahatan duniawi dan ukhrawi secara harmonis.

Aspek Layanan Pariwisata Halal

Kualitas layanan (*service quality*) merupakan fondasi utama dalam pembentukan kepuasan dan loyalitas wisatawan terhadap suatu destinasi. Menurut Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988), kualitas layanan diukur melalui dimensi *tangibility*, *reliability*, *responsiveness*, *assurance*, dan *empathy*, yang berpengaruh langsung terhadap persepsi wisatawan terhadap nilai destinasi. Dalam konteks pariwisata halal, dimensi tersebut diperluas dengan prinsip kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah, seperti penyediaan fasilitas ibadah, kehalalan produk makanan, dan etika pelayanan sesuai norma Islam (Battour & Ismail, 2016). Di Kabupaten Pangandaran, peningkatan kualitas layanan wisata berbasis syariah dapat menjadi strategi untuk memperkuat daya saing destinasi melalui layanan ramah Muslim yang tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan.



Kepuasan wisatawan (*tourist satisfaction*) muncul ketika layanan yang diterima sesuai atau melebihi harapan wisatawan. Oliver (1997) menjelaskan bahwa kepuasan merupakan hasil evaluasi kognitif dan afektif atas pengalaman wisata yang berdampak pada niat untuk berkunjung kembali. Dalam pariwisata halal, kepuasan tidak hanya mencakup aspek fungsional layanan, tetapi juga dimensi spiritual yang menciptakan rasa aman, nyaman, dan berkah selama perjalanan (El-Gohary, 2016). Peningkatan kepuasan wisatawan di Pangandaran dapat diwujudkan melalui penyediaan fasilitas akomodasi, kuliner, dan sarana

publik yang memenuhi standar halal sekaligus memperhatikan keberlanjutan sosial dan lingkungan.

Komunikasi digital melalui *Electronic Word of Mouth* (e-WOM) menjadi faktor strategis dalam membentuk persepsi dan minat wisatawan terhadap destinasi halal. Menurut Litvin, Goldsmith, dan Pan (2008), e-WOM memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan berkunjung, karena pengalaman positif wisatawan sering kali disebarluaskan melalui media sosial dan platform digital. Dalam konteks Pangandaran, ulasan positif terkait kebersihan pantai, keramahan masyarakat, dan kualitas layanan halal akan meningkatkan citra destinasi secara global. Implementasi strategi digital ini perlu disertai dengan konsistensi layanan di lapangan agar reputasi pariwisata halal tidak hanya kuat secara promosi, tetapi juga terjamin dalam pengalaman aktual wisatawan.

Loyalitas destinasi (*destination loyalty*) merupakan indikator keberhasilan pengelolaan pariwisata berkelanjutan. Chen dan Tsai (2007) menjelaskan bahwa loyalitas ditunjukkan melalui keinginan wisatawan untuk berkunjung kembali serta merekomendasikan destinasi kepada pihak lain. Dalam konteks pariwisata halal, loyalitas tidak hanya lahir dari kepuasan material, tetapi juga dari kepercayaan terhadap komitmen destinasi dalam menjaga prinsip syariah dan keberlanjutan (Rahman, 2014). Di Pangandaran, loyalitas wisatawan dapat dibangun melalui integrasi antara peningkatan layanan halal, pelestarian lingkungan pesisir, dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam rantai pasok pariwisata.

Akomodasi (*amenities*) menjadi elemen fundamental dalam layanan pariwisata halal. Ahyani, Putra, dan Mutmainah (2022) menegaskan pentingnya ketersediaan hotel atau penginapan dengan standar *Muslim-friendly hospitality*, seperti penanda arah kiblat, peralatan shalat, ketersediaan air bersih, serta jaminan privasi (Santoso & Argubi, 2020). Manajemen berkelanjutan menuntut agar akomodasi juga mengadopsi praktik ramah lingkungan, termasuk pengelolaan limbah, efisiensi energi, dan penggunaan sumber daya terbarukan (Komalasari & Herwangi, 2023). Pendekatan ini menunjukkan bahwa pariwisata halal dan pembangunan berkelanjutan tidak saling bertentangan, melainkan saling memperkuat dalam menciptakan pengalaman wisata yang etis dan ekologis.

Makanan dan minuman (*halal food*) menjadi aspek paling krusial dalam layanan pariwisata halal. Firdaus dan Hidayah (2021) menegaskan bahwa sertifikasi halal pada restoran, kafe, dan penjual makanan lokal merupakan keharusan untuk menjamin kepercayaan wisatawan Muslim. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, penggunaan bahan pangan lokal juga menjadi bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar (Al Mustaqim, 2023). Di Pangandaran, penerapan konsep *farm-to-table* untuk kuliner halal berbasis produk pesisir seperti ikan laut dan hasil perkebunan dapat memperkuat rantai nilai ekonomi lokal sekaligus mengurangi jejak karbon dalam distribusi bahan pangan.

Aksesibilitas dan fasilitas tambahan juga menjadi bagian integral dalam pengembangan layanan pariwisata halal. Nadiya dan Saraswati (2017) menunjukkan bahwa kemudahan akses fisik, seperti kualitas jalan dan transportasi umum, berkontribusi terhadap kenyamanan wisatawan. Namun, dalam konteks halal, ketersediaan fasilitas ibadah yang bersih dan mudah dijangkau di area publik serta objek wisata merupakan elemen wajib yang meningkatkan nilai destinasi (Ahyani, Putra, & Mutmainah, 2022). Oleh karena itu, integrasi antara infrastruktur, fasilitas ibadah, dan teknologi informasi perlu dirancang secara sinergis agar menciptakan pengalaman wisata yang inklusif, spiritual, dan berkelanjutan di Kabupaten Pangandaran.

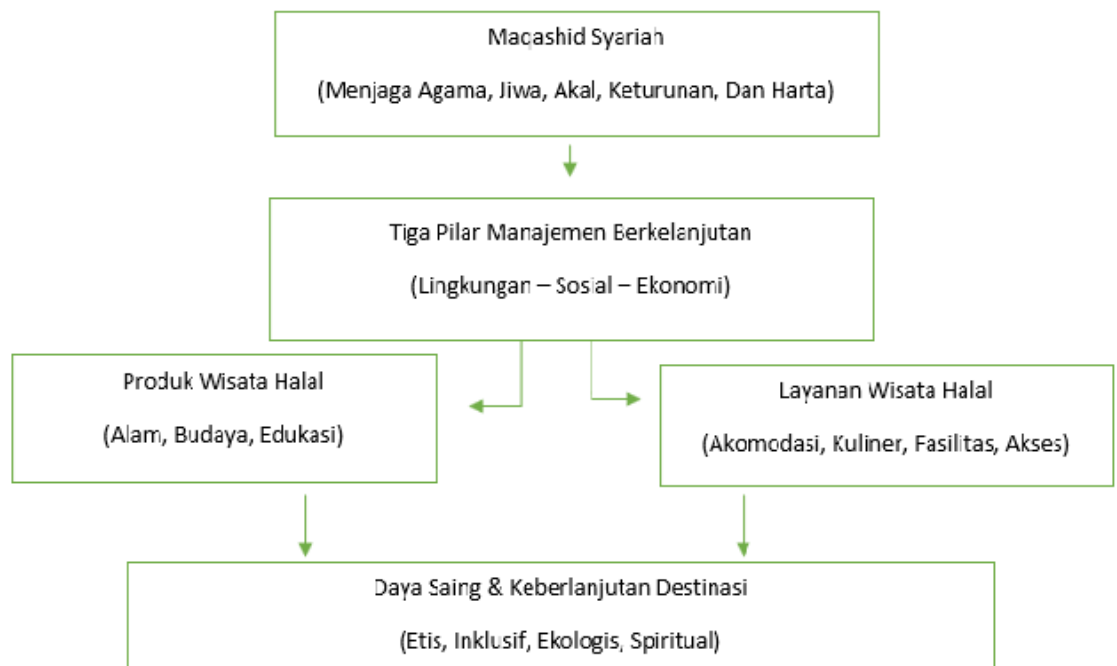
Sintesis Konseptual

Analisis kesenjangan antara standar halal nasional yang ditetapkan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) serta fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam tingkat penerapan di Kabupaten Pangandaran. Standar nasional menekankan pada pemenuhan aspek sertifikasi halal produk dan layanan, penyediaan fasilitas ibadah yang layak dan mudah diakses, pengelolaan rantai pasok halal, serta penerapan etika pelayanan sesuai prinsip syariah (KNEKS, 2022). Namun, kondisi aktual di Pangandaran menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku pariwisata, terutama di sektor akomodasi dan kuliner, belum memiliki sertifikasi halal resmi, melainkan masih mengandalkan klaim “halal secara tradisional” berdasarkan kepercayaan masyarakat lokal.

Selain itu, fasilitas ibadah di area wisata seperti pantai, restoran, dan pusat oleh-oleh belum sepenuhnya memenuhi standar kenyamanan dan kebersihan yang diatur dalam pedoman DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Dari sisi manajemen berkelanjutan, upaya pengelolaan lingkungan seperti pengurangan sampah plastik dan efisiensi energi pada akomodasi baru dilakukan sebagian pelaku usaha, belum menjadi praktik terstandar secara kelembagaan (Komalasari & Herwangi, 2023). Kesenjangan ini menandakan perlunya intervensi kebijakan daerah untuk mendorong sertifikasi halal terpadu, pelatihan *Muslim-friendly hospitality*, serta pembentukan tim audit halal daerah yang bekerja sama dengan LPPOM MUI guna memastikan bahwa setiap elemen layanan wisata di Pangandaran selaras dengan prinsip syariah dan keberlanjutan.

Kerangka sintesis konseptual penelitian ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara standar halal nasional dan kondisi aktual di Kabupaten Pangandaran melalui integrasi Maqāṣid Sharī'ah dan manajemen berkelanjutan. Nilai-nilai syariah seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menjadi landasan moral bagi pengelolaan destinasi yang tidak hanya halal secara normatif, tetapi juga berkelanjutan secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pendekatan ini menekankan bahwa prinsip kehalalan harus diimplementasikan melalui tata kelola destinasi yang ramah lingkungan, partisipatif, dan

berbasis kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Pangandaran, integrasi tersebut diwujudkan melalui penguatan produk wisata halal (alam, budaya, edukasi) dan layanan halal (akomodasi, kuliner, fasilitas ibadah, aksesibilitas) yang sesuai standar syariah dan prinsip keberlanjutan. Model ini diharapkan mampu memperkuat daya saing Pangandaran sebagai destinasi *Halal and Sustainable Coastal Tourism* yang etis, inklusif, dan ekologis.



Pengembangan Pariwisata Halal Berbasis Manajemen Berkelanjutan Pada Aspek Produk dan Layanan Pariwisata

Kerangka sintesis konseptual pada penelitian ini menggambarkan integrasi antara nilai-nilai Maqāṣid Shari'ah dan pilar-pilar manajemen berkelanjutan sebagai fondasi pengembangan pariwisata halal di Kabupaten Pangandaran. Pada lapisan pertama, *Maqāṣid Shari'ah* menjadi dasar normatif yang mengarahkan seluruh aktivitas pariwisata agar sejalan dengan tujuan syariat, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) (Al-Raysūni, 1992). Prinsip ini menegaskan bahwa pariwisata halal tidak hanya berorientasi pada profit ekonomi, tetapi juga pada pencapaian keberkahan, keseimbangan moral, dan tanggung jawab sosial.

Lapisan kedua merupakan dimensi Tiga Pilar Manajemen Berkelanjutan, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi. Ketiga pilar ini berfungsi sebagai struktur strategis untuk mengoperasionalkan nilai-nilai syariah dalam konteks pembangunan pariwisata modern. Pilar lingkungan menekankan pelestarian ekosistem pesisir Pangandaran melalui konservasi sumber daya alam dan pengelolaan limbah wisata secara efisien (Komalasari & Herwangi, 2023). Pilar sosial mengedepankan partisipasi masyarakat lokal, pelestarian budaya

tradisional seperti Seni Badud dan Gondang Buhun, serta peningkatan kesadaran terhadap nilai-nilai keberlanjutan. Sedangkan pilar ekonomi berfokus pada pemberdayaan UMKM halal, penggunaan produk lokal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian sumber daya.

Lapisan ketiga merupakan tahap implementatif yang terbagi menjadi dua domain utama: produk wisata halal dan layanan wisata halal. Produk wisata halal mencakup potensi wisata alam, budaya, dan edukasi yang dikembangkan dengan prinsip *thayyib*—baik, bersih, dan bermanfaat. Layanan wisata halal meliputi penyediaan akomodasi ramah Muslim, kuliner bersertifikasi halal, fasilitas ibadah yang layak, serta sistem aksesibilitas dan transportasi yang inklusif (Ahyani, Putra, & Mutmainah, 2022). Kedua domain ini saling berinteraksi secara dinamis: keberhasilan produk wisata yang etis membutuhkan dukungan layanan yang memenuhi standar syariah dan keberlanjutan, begitu pula sebaliknya.

Hubungan sinergis antara lapisan nilai, pilar, dan implementasi menghasilkan daya saing dan keberlanjutan destinasi. Integrasi ini diharapkan dapat menciptakan destinasi wisata yang etis, inklusif, ekologis, dan spiritual, sesuai dengan visi *Halal and Sustainable Tourism*. Dengan demikian, model konseptual ini tidak hanya menggabungkan aspek teologis dan ekonomi, tetapi juga menawarkan pendekatan holistik terhadap pengelolaan pariwisata berbasis nilai Islam yang selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan global (*sustainable development goals*).

Secara konseptual, kerangka ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pengembangan pariwisata halal berkelanjutan di Pangandaran bergantung pada kemampuan destinasi dalam menerjemahkan nilai-nilai Maqāsid Shari'ah ke dalam praktik manajerial yang konkret. Ketika prinsip perlindungan agama dan kehidupan disinergikan dengan tata kelola lingkungan, sosial, dan ekonomi yang berimbang, maka akan terbentuk destinasi yang tidak hanya menarik secara ekonomi, tetapi juga berkeadilan sosial dan ramah lingkungan. Dengan demikian, model ini dapat menjadi kontribusi teoretis bagi pengembangan *framework* pariwisata halal berkelanjutan di tingkat nasional maupun global.

Strategi implementasi manajemen berkelanjutan berbasis halal

Implementasi manajemen berkelanjutan berbasis halal dalam sektor pariwisata menuntut pendekatan yang menyeluruh antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan prinsip-prinsip syariah sebagai landasan etik. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap aktivitas wisata tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem dan nilai-nilai keagamaan yang menjadi dasar keberlangsungan pariwisata halal (Hakim, 2024). Dalam konteks Pangandaran, strategi implementasi ini dapat dikembangkan melalui tiga instrumen utama: sertifikasi hotel hijau ramah Muslim (*green hotel certification*), manajemen rantai pasok halal (*halal supply chain management*), dan pariwisata halal berbasis masyarakat (*community-based halal tourism*).

Penerapan *green hotel certification* menjadi langkah strategis untuk memastikan sektor akomodasi tidak hanya memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim, tetapi juga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Menurut Komalasari dan Herwangi (2023), konsep hotel hijau mencakup efisiensi energi, pengelolaan limbah, konservasi air, serta penggunaan bahan ramah lingkungan dalam operasional hotel. Ketika prinsip tersebut digabungkan dengan standar *Muslim-friendly hospitality*, maka akomodasi tidak hanya ramah terhadap lingkungan, tetapi juga terhadap nilai-nilai spiritual wisatawan. Praktik seperti penyediaan penanda kiblat, alat salat, makanan bersertifikat halal, serta kebijakan bebas alkohol dapat memperkuat citra Pangandaran sebagai destinasi wisata pesisir yang bersih, nyaman, dan sesuai syariat.

Manajemen rantai pasok halal (*halal supply chain management*) berperan penting dalam memastikan kehalalan dan keberlanjutan produk kuliner lokal yang menjadi daya tarik wisata Pangandaran. Firdaus dan Hidayah (2021) menjelaskan bahwa rantai pasok halal tidak hanya mencakup aspek bahan baku dan proses produksi, tetapi juga etika distribusi dan transparansi pelabelan produk. Penggunaan bahan pangan lokal seperti ikan segar, hasil laut, dan produk pertanian pesisir dapat mengurangi ketergantungan impor sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat setempat (Al Mustaqim, 2023). Jika diintegrasikan dengan sistem pengawasan halal daerah dan dukungan teknologi digital, maka rantai pasok halal ini dapat menjadi model efisiensi dan keberlanjutan bagi pengembangan kuliner khas Pangandaran seperti ikan asin, sale pisang, dan olahan laut.

Community-based halal tourism menjadi strategi kunci dalam memastikan partisipasi sosial masyarakat lokal sebagai aktor utama pengelolaan destinasi. Pendekatan berbasis komunitas ini berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dalam merancang, mengelola, dan memasarkan produk wisata halal sesuai nilai budaya dan agama yang mereka anut (Rahman, 2014). Dalam praktiknya, masyarakat dapat berperan sebagai pengelola homestay syariah, pemandu wisata halal, maupun produsen kerajinan dan kuliner berbasis kearifan lokal. Dengan dukungan pelatihan dan insentif dari pemerintah daerah, pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga memperkuat identitas sosial dan rasa memiliki terhadap destinasi (Utami & Hadi, 2022).

Ketiga strategi tersebut menunjukkan bahwa implementasi manajemen berkelanjutan berbasis halal di Pangandaran harus dijalankan secara integratif. *Green hotel certification* berfokus pada dimensi lingkungan, *halal supply chain management* menitikberatkan pada dimensi ekonomi, sedangkan *community-based halal tourism* menegaskan pentingnya dimensi sosial dan partisipatif. Kolaborasi antara ketiganya akan menciptakan sistem pariwisata yang tidak hanya patuh terhadap syariah, tetapi juga berdaya tahan secara ekologis, inklusif secara sosial, dan kompetitif secara ekonomi. Dengan demikian, strategi ini menjadi manifestasi konkret dari penerapan nilai *Maqāṣid Shari'ah* dalam kerangka *Sustainable Halal Tourism Management* di Kabupaten Pangandaran.

Aspek Regulasi dan Tata Kelola

Aspek regulasi dan tata kelola merupakan elemen kunci dalam mewujudkan sistem pariwisata halal yang terarah, terukur, dan berkelanjutan. Regulasi daerah Kabupaten Pangandaran saat ini masih berada pada tahap harmonisasi antara *Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah* dengan *Pedoman Pariwisata Halal Nasional* yang dikembangkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) serta Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Kemenparekraf berperan sebagai fasilitator kebijakan dan pembina standar pariwisata halal melalui program *Muslim Friendly Tourism Guidelines* (Kemenparekraf, 2022), sedangkan KNEKS berfokus pada penguatan ekosistem ekonomi syariah melalui integrasi sertifikasi halal, keuangan syariah, dan pemberdayaan UMKM. Dalam konteks Pangandaran, sinergi antara kebijakan pusat dan daerah perlu diperkuat agar prinsip kehalalan dan keberlanjutan tidak hanya menjadi jargon, tetapi terimplementasi dalam regulasi teknis, seperti standar akomodasi ramah Muslim, pengelolaan limbah wisata, dan pengawasan rantai pasok halal (Komalasari & Herwangi, 2023).

Tata kelola pariwisata halal di Pangandaran juga menuntut adanya kolaborasi multi-stakeholder yang melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat, akademisi, dan tokoh agama. Pendekatan ini sejalan dengan model *Collaborative Governance* (Ansell & Gash, 2008), yang menekankan partisipasi setara dan komunikasi lintas sektor dalam pengambilan keputusan. Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator, sektor swasta bertanggung jawab pada inovasi dan investasi layanan halal, masyarakat menjadi pelaksana utama kegiatan wisata berbasis komunitas, sedangkan ulama atau lembaga keagamaan berfungsi sebagai pengawal nilai-nilai syariah. Dengan mekanisme kolaboratif ini, tata kelola pariwisata halal dapat berjalan lebih akuntabel dan berkelanjutan, sekaligus menciptakan *trust-based governance* yang menjadi fondasi penting dalam pengembangan destinasi wisata berbasis nilai Islam.

Inovasi dan Digitalisasi Layanan

Transformasi digital menjadi pendorong utama dalam penguatan daya saing pariwisata halal berkelanjutan. Menurut Buhalis dan Sinarta (2019), digitalisasi pariwisata memungkinkan personalisasi layanan, efisiensi operasional, serta peningkatan pengalaman wisatawan melalui teknologi cerdas (*smart tourism ecosystem*). Dalam konteks Pangandaran, pengembangan aplikasi digital untuk sertifikasi halal dan reservasi akomodasi syariah dapat menjadi inovasi strategis. Sistem ini dapat mengintegrasikan database LPPOM MUI, Dinas Pariwisata, dan KNEKS untuk memudahkan verifikasi status halal suatu hotel, restoran, atau penyedia layanan wisata. Melalui aplikasi ini, wisatawan dapat mengakses informasi valid tentang sertifikasi halal, arah kiblat, fasilitas ibadah, serta menu makanan bersertifikat halal

di sekitar destinasi, sehingga meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap layanan pariwisata halal Pangandaran.

Selain itu, promosi destinasi halal dapat diperkuat melalui strategi digital marketing berbasis *Electronic Word of Mouth* (e-WOM) dan virtual experience. Studi Al-Ansi dan Han (2019) menunjukkan bahwa e-WOM berpengaruh signifikan terhadap persepsi, citra, dan loyalitas wisatawan pada destinasi halal. Melalui media sosial, vlog wisata, dan konten interaktif berbasis pengalaman spiritual, Pangandaran dapat membangun citra sebagai destinasi *Halal and Sustainable Coastal Tourism* yang modern dan autentik. Teknologi *virtual reality* (VR) dan *augmented reality* (AR) juga dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan keindahan alam, budaya lokal, serta fasilitas ramah Muslim kepada calon wisatawan sebelum melakukan perjalanan. Inovasi digital semacam ini tidak hanya memperluas jangkauan promosi, tetapi juga memperkuat prinsip keberlanjutan melalui efisiensi energi dan pengurangan biaya promosi konvensional.

Dengan sinergi antara kebijakan yang inklusif, tata kelola yang kolaboratif, dan inovasi digital yang adaptif, Pangandaran berpotensi menjadi model destinasi pariwisata halal berkelanjutan di tingkat nasional. Integrasi antara *good governance* dan *smart halal tourism* akan memperkuat posisi daerah ini sebagai destinasi unggulan yang mampu menyeimbangkan kepatuhan syariah, kemajuan teknologi, dan pelestarian lingkungan pesisir.

D. Conclusion

Pengembangan pariwisata halal berbasis manajemen berkelanjutan di Kabupaten Pangandaran memerlukan integrasi antara nilai-nilai Maqāṣid Sharī'ah dan tiga pilar keberlanjutan—lingkungan, sosial, dan ekonomi—sebagai dasar tata kelola destinasi. Prinsip kehalalan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan wisatawan Muslim, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral terhadap pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, serta pemerataan manfaat ekonomi. Hasil kajian menunjukkan bahwa pariwisata halal dan keberlanjutan bukanlah dua konsep yang berdiri terpisah, melainkan saling memperkuat dalam menciptakan destinasi yang etis, inklusif, dan ekologis. Dengan pendekatan ini, Pangandaran memiliki potensi menjadi model *Halal and Sustainable Coastal Tourism* yang harmonis antara spiritualitas Islam dan praktik pembangunan berkelanjutan global.

Pengembangan pariwisata halal di Pangandaran menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya tingkat sertifikasi halal, keterbatasan fasilitas ibadah, dan belum optimalnya pengelolaan lingkungan secara kelembagaan. Untuk menutup kesenjangan tersebut, dibutuhkan penerapan strategi terarah melalui sertifikasi hotel hijau ramah Muslim (green hotel certification), manajemen rantai pasok halal (halal supply chain management), serta pariwisata halal berbasis masyarakat (community-based halal tourism). Selain itu,

dukungan regulatif dari pemerintah daerah yang selaras dengan kebijakan KNEKS dan Kemenparekraf, kolaborasi multi-pihak yang melibatkan ulama, akademisi, dan pelaku usaha, serta transformasi digital melalui sistem sertifikasi halal daring dan promosi berbasis *e-WOM* akan memperkuat tata kelola destinasi yang adaptif dan berdaya saing. Dengan demikian, integrasi antara kebijakan, teknologi, dan partisipasi sosial akan menjadi kunci bagi terwujudnya pariwisata halal berkelanjutan yang berdaya ekonomi, beretika sosial, dan lestari secara ekologis di Kabupaten Pangandaran.

Bibliography

- Ahyani, N., Putra, A. H. P. K., & Mutmainah, N. (2022). *Muslim friendly tourism services and destination competitiveness in Indonesia*. *Journal of Halal Studies*, 3(2), 101–115.
- Al-Ansi, A., & Han, H. (2019). Role of halal-friendly destination attributes in forming behavioral intentions: The case of Muslim travelers in Indonesia. *Tourism Management Perspectives*, 31, 145–157. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2019.04.001>
- Al Mustaqim, M. (2023). *Pemberdayaan UMKM halal sebagai penggerak ekonomi lokal berbasis keberlanjutan*. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Pembangunan*, 7(1), 22–34.
- Al-Raysūni, A. (1992). *Nazariyyat al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Shāṭibī*. Riyadh: al-Dār al-ʿĀlamīyyah li al-Kitāb al-Islāmī.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Buhalis, D., & Sinarta, Y. (2019). Real-time co-creation and oneness service: Lessons from tourism and hospitality. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 36(5), 563–582. <https://doi.org/10.1080/10548408.2019.1592059>
- Firdaus, M., & Hidayah, S. (2021). *Halal supply chain management and culinary tourism development in Indonesia*. *Jurnal Manajemen Pariwisata*, 8(3), 210–225.
- Hakim, L. (2024). *Integrasi nilai maqāṣid sharī'ah dalam pengelolaan destinasi wisata halal berkelanjutan*. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 12(1), 55–69.
- Hunter, C. (1997). Sustainable tourism as an adaptive paradigm. *Annals of Tourism Research*, 24(4), 850–867. [https://doi.org/10.1016/S0160-7383\(97\)00036-4](https://doi.org/10.1016/S0160-7383(97)00036-4)
- Kemenparekraf. (2022). *Muslim Friendly Tourism Guidelines: Panduan destinasi ramah Muslim di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Komalasari, R., & Herwangi, Y. (2023). *Implementasi prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan wisata pesisir Pangandaran*. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan*, 14(2), 178–191.
- KNEKS. (2022). *Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Halal Nasional*. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Mitchell, G. P. (1991). *The Mitchell Principles of Sustainable Development*. In Hunter, C. (Ed.), *Tourism and the Environment: A Sustainable Relationship* (pp. 55–68). London: Routledge.
- Nadiya, R., & Saraswati, D. (2017). *Peningkatan aksesibilitas dan fasilitas publik dalam pengembangan destinasi wisata berkelanjutan*. *Jurnal Transportasi dan Pariwisata*, 5(1), 42–57.

- Rahman, F. (2014). Community-based halal tourism and local participation: A framework for sustainable Muslim travel. *International Journal of Islamic Tourism Studies*, 2(1), 33–47.
- Rahman, M., & Aziz, Y. A. (2019). The influence of halal tourism practices on destination competitiveness: Evidence from Lombok, Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 10(1), 93–112. <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2018-0073>
- Santoso, A., & Argubi, R. (2020). *Penerapan prinsip Muslim friendly hospitality pada industri akomodasi di destinasi wisata pesisir*. *Jurnal Pariwisata Islam*, 4(2), 121–136.
- Utami, D., & Hadi, S. (2022). *Smart Kampung dan penguatan tata kelola wisata berbasis masyarakat di Banyuwangi*. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 6(3), 145–160.
- UNWTO. (2020). *Muslim Friendly Tourism Guidelines*. Madrid: United Nations World Tourism Organization.